

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Studi

Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah maka APBD selalu menjadi tolak ukur akan kemajuan bangsa Indonesia. Pertumbuhan pembangunan baik itu pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan intra struktur merupakan target dari adanya APBD itu sendiri. Oleh karena itu menjadi tugas Pemerintah untuk menentukan kebijakan di bidang anggaran belanja agar stabilitas pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tetap dapat di pertahankan tanpa adanya bantuan dari luar negeri, artinya besarnya pengeluaran total tidak boleh melebihi besarnya pendapatan total (surplus).

Penyusunan anggaran dalam pembiayaan di suatu instansi Pemerintah merupakan salah satu elemen yang penting dalam pengelolaan instansi tersebut dalam mencapai hasil yang maksimal. Penyusunan anggaran yang baik sebagai system perencanaan koordinasi dan pengendalian dalam instansi tersebut. Oleh karena itu suatu instansi pemerintah dituntut mempunyai pimpinan yang dapat bekerja dengan efektif dan efisien, supaya mampu mengelola instansi tersebut dengan baik agar dapat menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan secara efektif, maka perlu adanya alat bantu untuk melaksanakannya salah satu alat tersebut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan alat dalam menentukan pendapatan dan pengeluaran, implementasi dari perencanaan pembangunan yang telah ditetapkannya, otorisasi pengeluaran, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memobilisasi pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Perencanaan APBD sebagai perwujudan keseluruhan aktivitas dan kegiatan pemerintah menuntut adanya partisipasi aktif yang menampung berbagai aspirasi masyarakat sehingga akan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, seperti yang telah tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) yang telah disusun.

Undang undang no 41 Tahun 2008 kebijakan anggaran merupakan salah satu paket tindakan pemerintahan dibidang pengeluaran dan penerimaan keuangan Negara. Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi, mengusahakan kesempatan kerja (mengurangi pengangguran), dan menjaga kestabilan. Dalam melaksanakan peranannya pemerintah melakukan dengan berbagai cara yaitu Penentuan kebijaksanaan. Pemberian pengarahan, perizinan, pengawasan.

Realisasi Anggaran merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan

realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menganalisis Anggaran dan Realisasi Anggaran pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan (DPPK) Kabupaten Bandung, masih terdapat ketidaksesuaian dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) diantaranya yaitu pada setiap akhir komponen tidak dicantumkan jumlahnya, kemudian pada Pos Belanja terdapat Pos tambahan yaitu Pos Belanja Bantuan Keuangan, kemudian pada Pos Pembiayaan tidak terdapat Komponen Pinjaman dalam Negeri Pemerintah Pusat, Pinjaman dalam Negeri Pemerintah Daerah Lainnya, Pinjaman dalam Negeri Lembaga Keuangan Bank, Pinjaman dalam Negeri Lainnya, Sedangkan pada Pos Pengeluaran Pembiayaan tidak terdapat komponen Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara.

Bertitik tolak pada masalah tersebut, dan mengingat pentingnya suatu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk pengambilan keputusan maka penulis tertarik untuk melakukan Tinjauan lebih lanjut yang dituangkan dalam laporan Tugas Akhir yang berjudul : **“ANALISIS ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN (DPPK) KABUPATEN BANDUNG”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana anggaran pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung ?
2. Bagaimana realisasi anggaran pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan (DPPK) Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana hambatan-hambatan dalam anggaran dan realisasi anggaran pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung ?

1.3 Maksud dan Tujuan Studi

Maksud dan tujuan studi yang dilakukan oleh penulis sebagai dasar penyusunan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui anggaran pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung ?
2. Untuk mengetahui realisasi anggaran pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung ?
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung?

1.4 Kegunaan Studi

Dari Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan, penulis mengharapkan bahwa laporan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi:

1. Penulis

Proses dan hasil selama praktek kerja lapangan ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman penulis dengan membandingkan antara teori yang didapat selama masa perkuliahan dengan kenyataan yang dihadapi di dunia kerja.

2. Instansi

Hasil ini diharapkan dapat menjadi salah satu rekomendasi dan/atau masukan bagi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung untuk mengadakan peningkatan serta perbaikan demi menunjang kelancaran aktivitas dan kemajuan instansi.

3. Akademik

Sebagai bahan panduan dan informasi yang bermanfaat bagi mahasiswa yang akan melakukan lebih lanjut, serta diharapkan dapat memberikan wawasan baru terhadap mahasiswa.

4. Pihak Lain

Hasil ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan juga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi yang membacanya.

1.5 Metode Pendekatan

Dalam melakukan studi ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu metode kualitatif yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang didapat secara langsung dari narasumber, baik secara tertulis maupun lisan biasanya pengumpulan data pada metode ini dilakukan dengan cara wawancara kepada narasumber secara langsung, melakukan observasi ke lapangan serta juga didapat dari hasil diskusi. Dari data – data yang dikumpulkan seseorang yang akan dikembangkan menjadi sebuah rangkuman data yang kompleks. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah:

1. Sumber Data

a) Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari instansi melalui wawancara dan observasi pada bagian yang terkait di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan (DPPK) Kabupaten Bandung.

b) Data Sekunder

Untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari teori – teori yang berhubungan dengan analisis anggaran dan realisasi anggaran, serta literature atau sumber tertulis lainnya yang relevan dengan masalah yang di tinjau dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini.

2. Metode Pengumpulan Data

Sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan data yang sesuai dengan objek, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a) Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung pada objek instansi melalui pengamatan dan pencatatan yang diperoleh kebenarannya.

b) Wawancara

Yaitu bentuk komunikasi lisan yang tujuannya untuk memperoleh informasi mengenai Anggaran dan Realisasi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung.

c) Dokumen

Yaitu sesuatu yang tertulis /tercatat yang dipakai sebagai bukti/keterangan berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.

3. Metode Pengolahan Data

Adapun metode pengolahan data yang dilakukan dalam proses penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer tentang penyusunan laporan realisasi anggaran yang diperoleh dan kemudian disusun.
- b. Data yang terkumpul diinterpretasikan tentang arti dari data tersebut.
- c. Setelah data tersebut ditinjau kemudian ditarik kesimpulan dan disajikan.

1.6 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

1.6.1 Lokasi

Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung yang beralamat di Jl. Raya Soreang No. 141, Bandung – Jawa Barat No Telp.: (022) 5891004.

1.6.2 Waktu

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan selama 25 (dua puluh lima) hari kerja yaitu dimulai dari tanggal 03 Maret 2014 sampai dengan 03 April 2014. Adapun jadwal Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah sebagai berikut:

Hari Praktek Kerja	: Senin - Jumat
Jam Praktek Kerja	: 07.30 - 15.00 WIB
Istirahat	: 12.00 - 13.00 WIB

